

LAMPIRAN



**PETA PENETAPAN WILAYAH
KPHL MODEL TARAKAN
KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



LAMPIRAN KEPUTUSAN ANTI-DEKONSTRUKSI DAN BUDIDAYA
MUSYAWARAH DESA, 785/Mus/01/2019
TARAKAN, 11 Desember 2019

**MENTERI KEHUTANAN,
ZULKIFLI HASAN**

KETERANGAN :

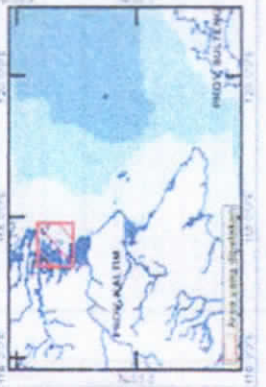
- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Kota Kecamatan/Desa
- Gunung
- A. Trik Tinggi
- Lintasan KPHL
- Wilayah Persebaran
- Batas Kabupaten/Kota
- Jaringan
- Sungai dan anak sungai
- Danau
- Lintasan KPHL

**PUNCAK KAWASAN HUTAN
MULAI LINDUNG
MULAI (Produk) Tetap**

NUMBER DATA :

1. Data Sektoral dan Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Data Raster dan Vektor
3. Data Raster dan Vektor
4. Data Raster dan Vektor

PETA SITUASI
Skala 1 : 8.000.000



DEPARTEMEN KEHUTANAN



UPT. KPH TARAKAN
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PETA

**PENATAAN BLOK
HUTAN LINDUNG P. TARAKAN**



50 N

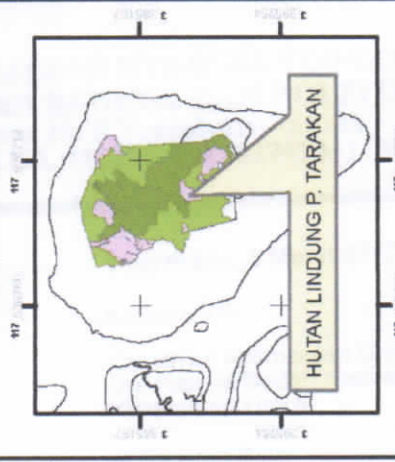
SKALA 1 : 65.000



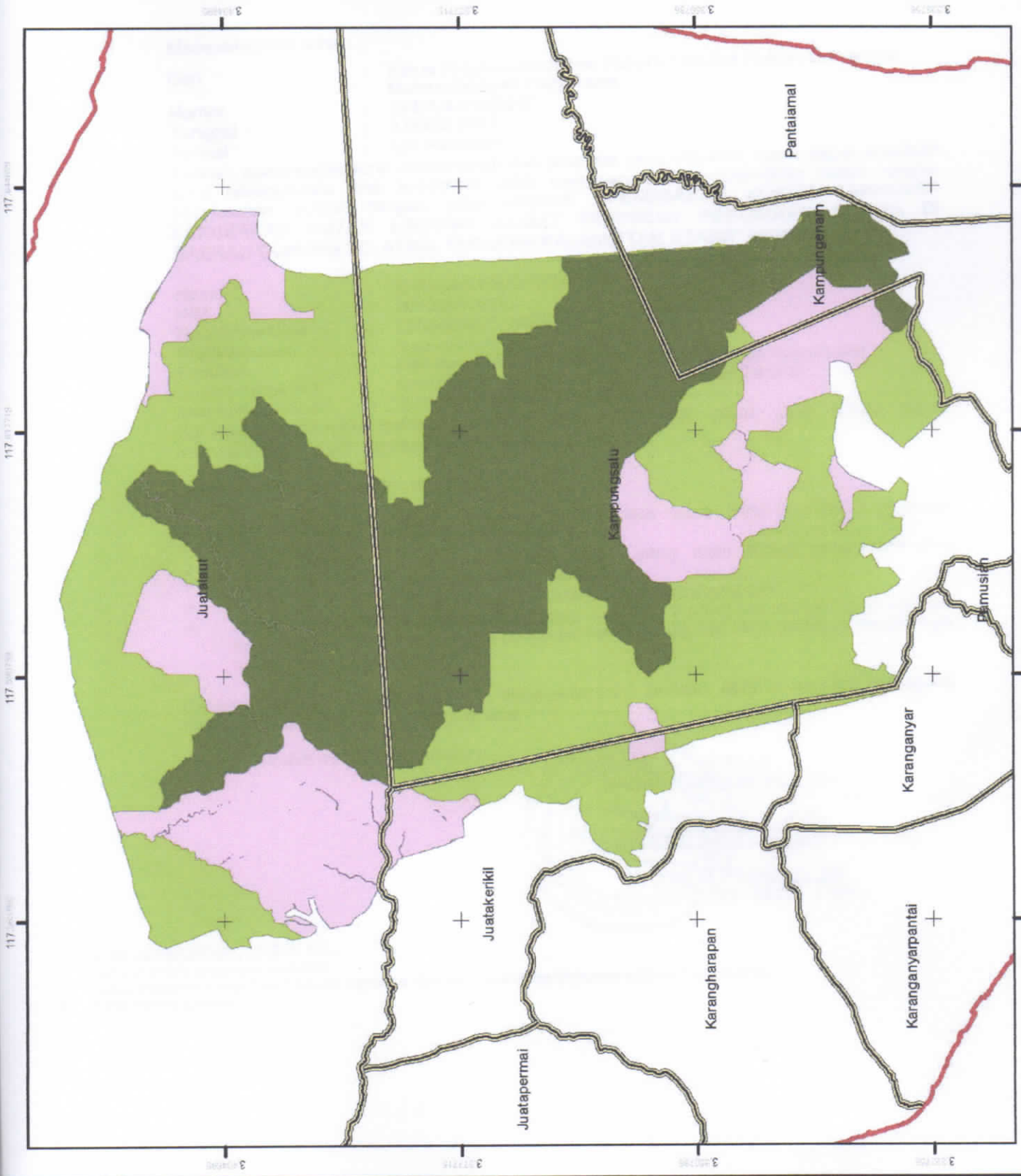
KETERANGAN :

- Batas Kelurahan
- Batas Pulau Tarakan
- Blok Inti
- Blok Khusus
- Blok Pemanfaatan

**PETASITUASI PULAU TARAKAN
SKALA 1 : 500.000**



| Keterangan | KECAMATAN | KELURAHAN | Luas, Ha |
|------------------|----------------|-------------|-----------|
| Blok Inti | Tarakan Timur | Kampungenam | 320,6063 |
| Blok Inti | Tarakan Utara | Juatlaut | 879,4208 |
| Blok Inti | Tarakan Timur | Pantaiamal | 0,013919 |
| Blok Inti | Tarakan Tengah | Kampungatsu | 1365,939 |
| Blok Khusus | Tarakan Timur | Kampungenam | 67,96778 |
| Blok Khusus | Tarakan Utara | Juatkerkil | 83,38035 |
| Blok Khusus | Tarakan Utara | Juatlaut | 807,3698 |
| Blok Khusus | Tarakan Tengah | Kampungatsu | 404,7221 |
| Blok Pemanfaatan | Tarakan Barat | Karanganyar | 12,59037 |
| Blok Pemanfaatan | Tarakan Timur | Kampungenam | 30,82992 |
| Blok Pemanfaatan | Tarakan Utara | Juatkerkil | 231,9774 |
| Blok Pemanfaatan | Tarakan Utara | Juatlaut | 1117,9995 |
| Blok Pemanfaatan | Tarakan Tengah | Kampungatsu | 1739,229 |
| | | Jumlah | 7056,041 |





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2349/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Kalimantan Utara
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
Kalimantan Utara

di Tanjung Selor

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 094/A.4-II/III/2017
Tanggal : 8 Maret 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN LINDUNG AKIBAT PENDIRIAN PEMUKIMAN WARGA DI DAERAH GUNUNG SELATAN, TARAKAN KALIMANTAN UTARA" kepada:

Nama : ENGGAR PRAYOGA
NIM : 20130610034
No.HP/Identitas : 085346362658/6473011603950007
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dinas Pertamanan Tarakan, Dinas BPLH Tarakan
Waktu Penelitian : 20 Maret 2017 s.d 30 April 2017
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.